

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH FINAL) ATAS LELANG TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH:

IIF RULDAYANI

NIM. 01770623555



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

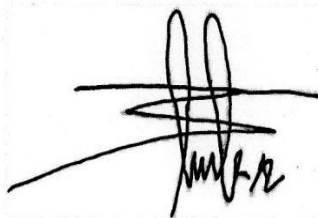
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : IIF RULDAYANI
NIM : 01770623555
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH FINAL) ATAS LELANG TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU

Pekanbaru, 28 Maret 2020

Disetujui oleh:

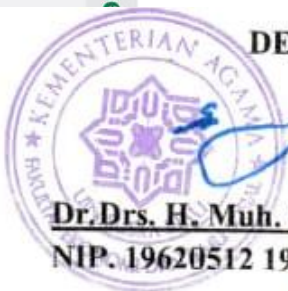
PEMBIMBING



Muammar Alkadafi, S. Sos, M. Si
NIK. 130712075

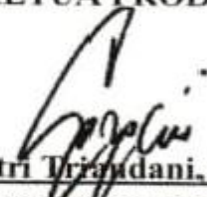
MENGETAHUI

DEKAN



Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PRODI



Sahwitri Triandani, SE.M.Si
NIP. 19820806 200604 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : IIF RULDAYANI
NIM : 01770623555
PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH FINAL) ATAS LELANG TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 28 APRIL 2020

Pekanbaru, 18 Mei 2020

Disetujui oleh:

KETUA PENGUJI

Sahwitri Triandani, SE.M.Si
 NIP. 19820806 200604.2 002

ANGGOTA

PENGUJI I

Irien Vidianda Anggriani, SE, M.Si
 NIP. 19751106 200710 2 003

PENGUJI II

Dr. Muhammad April, SH,M.Hum
 NIK. 130712072

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH FINAL) ATAS LELANG TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU

Oleh : Iif Ruldayani

Implementasi Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan final atas Lelang Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 yang berlaku saat ini. Tugas akhir ini menggunakan Metode Deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Implementasi Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan final atas Lelang Tanah dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru sudah berjalan dengan lancar namun masih ada kendala dalam Pelaksanaan Penyetoran di KPKNL Pekanbaru yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyetoran, akan tetapi ada upaya yang dilakukan Bendahara KPKNL Pekanbaru dalam mengatasi kendala-kendala saat Penyetoran PPh final atas Lelang tanah dan bangunan di KPKNL Pekanbaru yang membuat tidak terjadi lagi keterlambatan pada saat melakukan Penyetoran. Dengan melakukan penyetoran dengan menggunakan sistem elektronik (billing system) secara otomatis sudah merupakan bagian dari pelaporan.

Kata kunci: *Pemotongan, Penyetoran, Pph Final, Lelang.*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH FINAL) ATAS LELANG TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU”** merupakan hasil karya ilmiah yang di tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

Orang tuaku tercinta, ayahanda (Alm) Khairul Efendi dan ibunda (Almh) Nurhidayah yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh yang kuasa sebelum bisa melihat saya mengenakan toga yang mereka impikan selama ini. Terimakasih atas doa, curahan kasih sayang yang selalu dirindukan dan terimakasih juga buat Nenek yang telah membesarkan penulis dengan tetesan keringatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga penulis bisa merasakan nikmat nya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan Studi ini dengan baik.

Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M, Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibu Irien Violinda Anggriani, SE, M.Si selaku Sekretaris Program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Muamar Alkadafi S.Sos, M.Si selaku pembimbing yang selalu memberikan nasihat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam Penulisan Tugas akhir ini.

Seluruh Dosen dan Staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. memberikan banyak ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.

Kepada segenap jajaran pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pekanbaru yang telah memberikan data untuk mendukung penyusunan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Abang dan Kakak Terkhusus untuk kak Intan Nurazni, S. Farm, Kak Yani Astuti, S.Pd, Abang Agus Kamal, S. Sos dan Abang Arif Rachman yang telah membantu dan memberi semangat untuk menyelesaikan Tugas akhir ini.

Terimakasih buat teman-teman Seperjuangan kelas A Angkatan 2017 Administrasi Perpajakan, Terutama Lilis, Annisa, Melisa, Elsa, Nova, Dila, Dini, Hefiza dan Wanda yang selalu memberikan informasi terkait proses perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Syarif Kasim Riau dan terimakasih juga buat Sahabat Terbaikku Akmal, Ayu, Miftah, dan Assyifa yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 28 Maret 2020
Penulis,

Iif Ruldayani
NIM.01770623555

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II GAMBARAN UMUM.....	10
2.1 Sejarah Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru	10
2.2 Visi dan Misi	12
2.3 Struktur Organisasi	13
2.4 Uraian Tugas	14
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	17
3.1 Tinjauan Teori	17
3.1.1 Pengertian pajak	17
3.1.2 Fungsi pajak	18
3.1.3 Jenis Pajak.....	18
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	20
3.1.5 Pajak Penghasilan	20
3.1.6 Pajak Penghasilan Final	22
3.1.7 Pajak Penghasilan Final atas Lelang Tanah dan Bangunan	25
3.1.8 Lelang.....	31
3.1.9 Pajak Pandangan Islam	32



3.2 Tinjauan Praktek.....	33
3.2.1 Implementasi Pemotongan dan penyeteroran PPh final atas Lelang tanah dan bangunan	33
3.2.2 Kendala dalam penyeteroran PPh final atas lelang tanah dan bangunan di KPKNL Pekanbaru	45
3.2.3 Upaya mengatasi terlambat menyeteror PPh final atas tanah dan bangunan di KPKNL Pekanbaru	46
3.2.4 Perbandingan Teori dan Tinjauan Praktek.....	56
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan target dan realisasi pokok lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pekanbaru tahun 2017-2019.....	3
Tabel 2.1	Daftar nama pegawai KPKNL Pekanbaru	13
Tabel 3.1	Data Pemotongan Pajak Penghasilan final atas lelang tanah dan bangunan pada KPKNL Pekanbaru periode desember 2019.....	41
Tabel 3.2	Data pokok lelang dan jumlah penyetoran pajak atas tanah dan bangunan pada KPKNL Pekanbaru 2017-2019	42
Tabel 3.3	Data Penyetoran Pajak Penghasilan final atas lelang tanah dan bangunan pada KPKNL Pekanbaru periode desember 2019.....	44
Tabel 3.4	Perbandingan Teori dan Praktek dalam implementasi pemotongan dan penyetoran PPh final atas lelang tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru.....	46

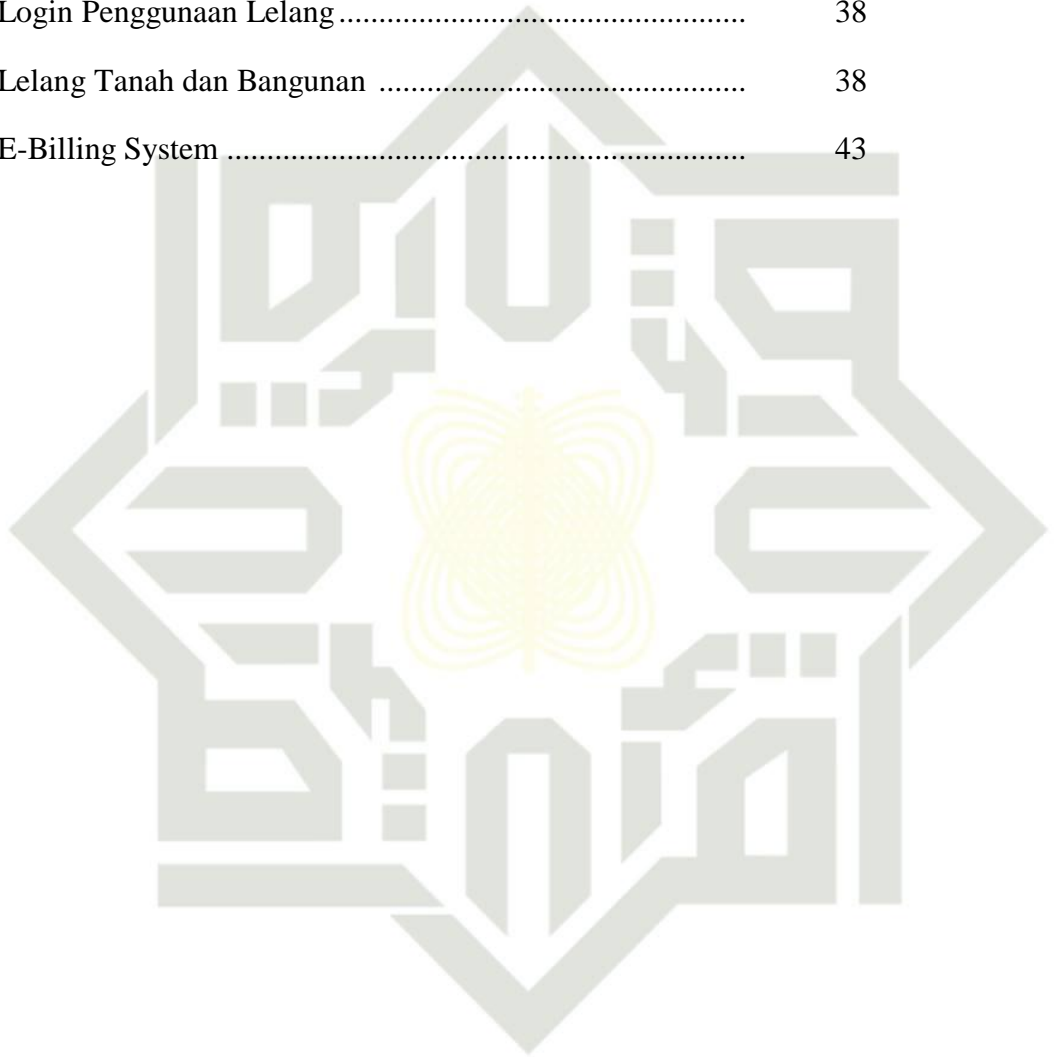
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru	13
Gambar 3.1	Prosedur Lelang.....	34
Gambar 3.1	Login Penggunaan Lelang.....	38
Gambar 3.3	Lelang Tanah dan Bangunan	38
Gambar 3.4	E-Billing System	43



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, Pembangunan tersebut sehingga menjadi perhatian yang cukup serius baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat, karena dengan adanya pembangunan tersebut diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera untuk mewujudkan kemandirian dalam pembangunan tersebut diperlukan biaya yang relatif tidak sedikit, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan tersebut ialah dengan menggali dan menggerakkan segala potensi di bidang pajak.

Pemerintah selalu berupaya memperbaiki peraturan perpajakan agar sesuai dengan dengan perkembangan zaman guna menghindari implikasi ketidakcukupan penerimaan pajak dan pembagian beban pajak yang tidak sesuai. Sehubungan dengan itu, maka pemerintah berusaha untuk menggalakkan pelaksanaan pemungutan pajak. Sebagai realisasinya, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang perpajakan yang baru. Salah satunya adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1994 dan UU Nomor 17 Tahun 2000 serta terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai berlaku di seluruh Indonesia tanggal 1 Januari 2009. Pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh-Final).

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya dan dengan demikian penghasilan yang dikenakan PPh final tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya.

Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 jenis penghasilan yang dikenakan PPh Final yaitu: penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan dari transaksi pengalihan harta berwujud tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Perundang-undangan Perpajakan

Lelang tanah dan bangunan dikenakan pajak atas penghasilan bersifat final yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya, perlu menetapkan peraturan menteri keuangan tentang tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan dan pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan beserta perubahannya.

Pelaksanaan lelang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 27/PMK.06/06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Pelaksanaan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang di dahului dengan pengumuman lelang. Berikut penulis sajikan target dan realisasi hasil pokok lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pekanbaru

Tabel 1.1: Target dan Realisasi pokok lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru 2017 – 2019

No	Tahun Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2017	54.000.000.000	160.504.774.882	297
2	2018	135.407.000.000	71.477.341.100	53
3	2019	172.000.000.000	134.209.165.290	78

Sumber : KPKNL Pekanbaru, 2019

Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 realisasi hasil, target yang ditetapkan pun menurun dari tahun ke tahun. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel pada tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 160.504.774.882 dari target Rp. 54.000.000.000 atau 297%, pada tahun 2018 realisasinya sebesar Rp. 71.477.341.100 dari target Rp. 135.407.000.000 atau 53% dan pada tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realisasinya sebesar Rp. 134.209.165.290 dari target Rp. 172.000.000.000 atau 78%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa target dan dan realisasi pokok lelang di KPKNL Pekanbaru mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019 yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga terjadi masalah dalam upaya pencapaian target hasil lelang.

Ada berapa macam permasalahan yaitu pertama, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas sehingga masyarakat kurang memahami tentang cara pelaksanaan pelayanan lelang. Penyebab kedua, kurangnya dokumen dalam pengajuan permohonan lelang, sehingga itu menjadi penyebab tertundanya pelaksanaan lelang. Penyebab ketiga, terjadinya pembatalan lelang yang disebabkan gangguan system pada saat pelaksanaan lelang. oleh sebab itu penurunan pokok lelang mengakibatkan jumlah penyeteroran pph final atas lelang tanah dan bangunan juga mengalami penurunan.

KPKNL Pekanbaru meskipun punya permasalahan dalam upaya pencapaian target hasil lelang, KPKNL Pekanbaru tetap menjalankan tugasnya. Menerapkan sistem pengenaan pajak penghasilan final dalam menjalankan tugasnya. Dalam pemungutan pajaknya KPKNL Pekanbaru menganut system pemungutan pajak *official assessment system* dimana yang berhak melakukan pengenaan adalah bendahara penerimaan KPKNL pekanbaru berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, sehingga wujud dari kepatuhan perpajakan dalam melaksanakan pemungutan pajak. Selain melaksanakan pemungutan pajak, bendahara KPKNL Pekanbaru melakukan pemotongan dan penyeteroran. Dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyetoran PPh final adanya keterlambatan dalam menyetor pajak pph final oleh bendahara KPKNL Pekanbaru.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas dalam menyusun tugas akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH FINAL) ATAS LELANG TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU ”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pph final atas lelang tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru?
2. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala saat penyetoran PPh final atas lelang tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan pemotongan dan penyetoran pph final atas lelang tanah dan bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala saat penyeteroran PPh final atas lelang tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru

3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis.

Menambah wawasan tentang pengelolaan Negara khususnya lelang, serta menerapkan teori dan kejadian nyata serta sebagai salah satu syarat dalam pelaporan tugas akhir .

2. Manfaat bagi Perusahaan

Penulis mengharapkan kegunaan kegiatan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk pelaksanaan pemotongan dan penyeteroran PPh final atas lelang tanah dan bangunan dengan baik.

3. Manfaat bagi Pembaca

Di harapkan hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan diharapkan sebagai bahan tinjauan untuk menilai usaha usaha yang dilaksanakan DJKN dalam pengelolaan aset Negara secara transparan dan bertanggung jawab dan mengetahui tentang lelang di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang pekabaru.

4 Metode Penelitian

4.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.24, Tangkerang Tengah kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Kode pos : 28125

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru selama 2 bulan yaitu terhitung februari 2020 hingga Maret 2020.

1.4.3 Jenis Data**1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari tempat lokasi penelitian di kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang pekanbaru.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti melainkan di peroleh melalui beberapa dokumen yang sudah tersedia, data tersebut dalam bentuk catatan, buku dan sebagainya.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data.**1. Wawancara**

Wawancara adalah Tanya jawab kepada narasumber di KPKNL Pekanbaru yang berhubungan dengan masalah penelitian ini khususnya kepada bidang pelayanan lelang, Dalam hal ini menjadi Narasumber adalah itu bapak David Sihombing dan Yose Fernando selaku pejabat lelang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung di KPKNL Pekanbaru yang berhubungan dengan masalah ini. Dengan melihat dari gejala gejala yang ada di lapangan menjadi objek penelitian penulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.

1.4.5 Analisis Data

Analisis data yaitu dilakukan dengan cara menghubungkan kenyataan yang ada, yaitu dengan metode deskriptif. Suatu cara menyusun data yang sudah ada sedemikian rupa kemudian di analisis dan dihubungkan dengan teori yang sudah diperoleh dan mendukung, kemudian diambil satu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

1.5 Sistematika Pembahasan.

Untuk keperluan penyusunan ini nantinya, maka secara umum penulis menguraikan kedalam empat Bab yang masing-masing Bab menjadi Sub Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan serta metode penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Merupakan iuraian tentang sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pekanbaru, visi dan misi, struktur organisasi serta uraian tugas dari masing masing di bidang yang ada di instansi tersebut.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Merupakan uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran bermanfaat bagi kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 1945, pemerintah menggulirkan program pengucuran atau pemberian pinjaman dana untuk kredit bagi para pengusaha kecil dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat pasca penjajahan. Kebijakan ini digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang didirikan oleh Muhammad Hatta pada tahun 1946. Dalam perkembangannya, pengucuran atau pinjaman dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut tidak dapat dikembalikan tepat pada waktunya, bahkan dana tersebut menjadi kredit macet.

Apabila keadaan tersebut tidak segera dilakukan langkah pengamanan, maka dikhawatirkan merugikan keuangan dan kekayaan Negara yang selanjutnya akan memperlambat pertumbuhan perekonomian negara. berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0241/1958 tanggal 6 April 1958 dibentuk Panitia Penyelesaian Piutang Negara (P3N) dengan tugas melakukan penyelesaian piutang negara dengan tugas melakukan penyelesaian piutang negara dengan cara Parate Eksekusi. Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jendral Pajak ke dalam struktu organisasi BUPN, sehingga dibentuklah organisasi baru yang bernama Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN).

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN). Reformasi Birokrasi dilingkungan dapartemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan

dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jendral Pembendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementrian Republik Indonesia , DJPLN berubah menjadi Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

2.2 Visi dan Misi Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pekanbaru

Visi Instansi

Menjadikan pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Misi Instansi

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan Kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Mewujudkan Meningkatkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

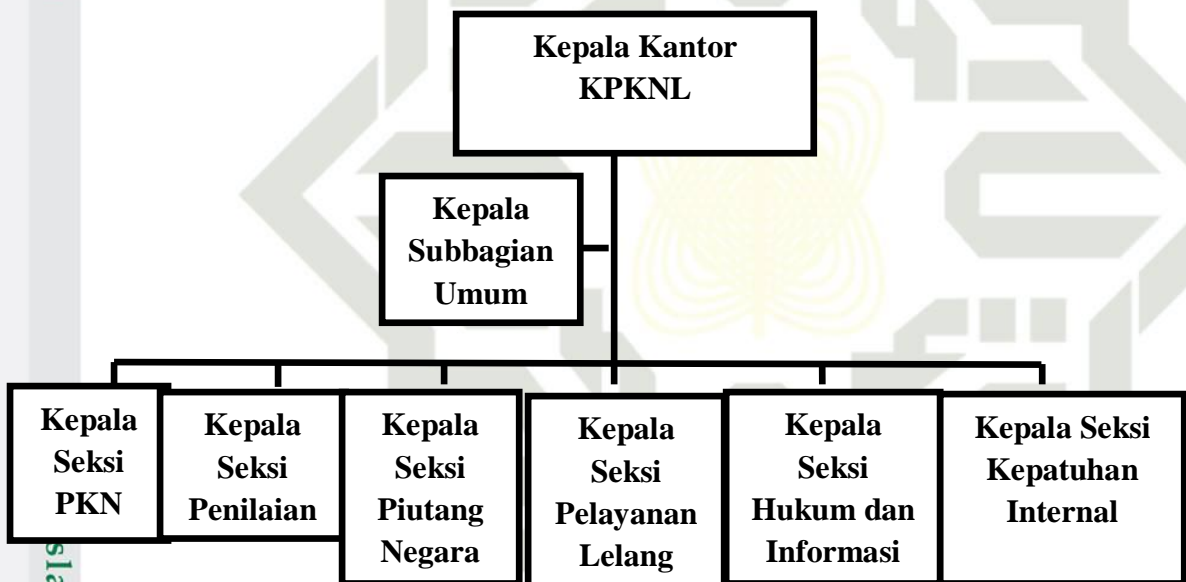
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Struktur Organisasi Kantor pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pekanbaru

Struktur organisasi disusun sebagai syarat mutlak atau yang harus ada dalam setiap perusahaan atau lembaga, karena struktur organisasi membagi peranan serta tanggung jawab wewenang tiap-tiap seksi yang ada dalam perusahaan atau lembaga. Struktur organisasi ini dibuat atau disusun agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Sebagaimana struktur KPP Pratama Dumai terlihat dalam Gambar 2.1:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KPKNL PEKANBARU



Sumber : KPKNL Pekanbaru, 2020

Tabel 2.1: Daftar Nama Pegawai KPKNL Pekanbaru Tahun 2020

Nama Pegawai	Jabatan
Rachmat Kurniawan	Kepala Kantor
Wiwiek Indrawati	Kepala Subbagian Umum
Syaiful Adli	Kasi Hukum & Informasi
Tri Sutopo	Kasi Kepatuhan Internal
Kristiniawati	Kasi Pelayanan Penilaian
Prapti Suryaningsih	Kasi Piutang Negara
Ramli Simbolon	Kasi Pelayanan Lelang
Rofiq Khamdani Yusuf	Kasi Pengelolaan Kekayaan

Sumber: KPKNL Pekanbaru, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru

1. Kepala Kantor KPKNL

Uraian Tugas dan Kegiatan

- a. Menyelenggarakan urusan penerimaan/penolakan/pengembalian penyerahan piutang negara sesuai ketentuan yang berlaku. Menyelenggarakan penerbitan Penyerahan Bersama (PB) atau keputusan Penetapan Jumlah Hutang Negara (PJHN).
- b. Menyelenggarakan penatausahaan, pengamanan dan pendayagunaan dokumen dan fisik barang jaminan atau harta kekayaan lainnya.
- c. Menyelenggarakan penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa (SP) dalam rangka penagihan piutang negara.

2. Subbagian Umum

Uraian Tugas dan Kegiatan

- a. Menyelenggarakan urusan surat masuk dan surat keluar.
- b. Menyusun daftar urut kepangkatan dan formasipegawai di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian KPKNL.
- d. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Uraian Tugas dan Kegiatan

- a. Melaksanakan penyelesaian penetapan status penggunaan/ penguasaan kekayaan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melakukan analisa pertimbangan permohonan penghapusan kekayaan negara.
 - c. Melaksanakan akuntansi, pelaporan, dan penyusunan daftar barang milik negara.
 - d. Melakukan analisa pertimbangan permohonan pemindah tangan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah) kekayaan Negara
4. Seksi Pelayanan Penilaian
- Uraian Tugas dan Kegiatan
- a. Mengkoordinasikan penilaian atas barang jaminan yang dilakukan oleh tim penilaian.
 - b. Melaksanakan panggilan potensi di bidang penilaian sumber daya alam, real property, property khusus dan usaha.
 - c. Melaksanakan pemeliharaan dan pengarsipan secara manual atas laporan penilaian yang telah dilakukan.
 - d. Menginput data penilaian ke database penilaian.
5. Seksi Piutang Negara
- Uraian Tugas dan Kegiatan
- a. Menyiapkan konsep surat permintaan kelengkapan data kepada penyerah piutang dalam hal berkas tidak lengkap atau tidak jelas.
 - b. Menyiapkan konsep surat tanggapan koreksi atas perubahan dalam menetapkan besarnya piutang negara.

- c. Menyiapkan Surat Pemberitahuan Persetujuan/ penolakan pemberian keringanan Hutang.
- d. Menyiapkan konsep surat panggilan/ panggilan terakhir kepada Penanggung Hutang/ Penjam

6. Seksi Pelayanan Lelang

Uraian Tugas dan Kegiatan

- a. Menyusun rencana Kerja Seksi Pelayanan Lelang sebagai bahan penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan.
- b. Mengajukan usul konsep penetapan jadwal lelang.
- c. Melakukan analisa kelengkapan dokumen lelang.
- d. Melakukan pembukuan piutang negara dan pelaporan hasil lelang.

7. Seksi Hukum dan Informasi

Uraian Tugas dan Kegiatan

- a. Mengkoordinasikan pembukuan atas hasil penerimaan pengurusan piutang negara dan lelang.
- b. Melaksanakan pembuatan rincian jumlah hutang untuk keperluan lelang.
- c. Melaksanakan pengembalian kelebihan hasil Piutang Negara dan Lelang.
- d. Melaksanakan pengembalian uang jaminan lelang yang masuk melalui rekening Bendaharawan Penerimaan.

8. Kepala Seksi Kepatuhan Internal

Melakukan pemantauan pengadilan intern, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa:

1. Secara keseluruhan ditinjau dari Perbandingan antara Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek tidak ada perbedaan dalam penerapan Pemotongan yang dilakukan oleh bendahara KPKNL Pekanbaru pada PPh Final atas lelang tanah dan bangunan telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun yang berlaku saat ini dan KPKNL Pekanbaru penerapannya sudah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah yaitu 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
2. Penyetoran yang dilakukan oleh bendahara penenerimaan KPKNL Pekanbaru pada PPh Final atas lelang tanah dan bangunan telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun ada kendala pada saat mengimplementasikannya. Hal ini disebabkan karena Ada terdapat transaksi penyetoran PPh Final atas lelang tanah dan/atau bangunan melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Penyebab keterlambatan dalam penyetorannya karena sistem ebilling eror dan jaringan yang bermasalah.
3. Kendala-kendala dalam Penyetoran PPh final atas lelang tanah dan bangunan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru

keterlambatan pada saat menyeter PPh final atas lelang tanah dan bangunan yaitu pada saat penyeteran Server sse.pajak.go.id yang tiba down dan jaringan yang bermasalah. Upaya yang dilakukan terkait Server sse.pajak.go.id yang tiba down, bendahara KPKNL Pekanbaru menunggu dan selalu mengecek Server sse.pajak.go.id agar bisa digunakan lagi untuk penyeteran. Dan terkait dengan sistem jaringan yang bermasalah upaya yang dilakukan bendahara KPKNL Pekanbaru dalam mengatasi permasalahan gangguan sistem, bendahara KPKNL Pekanbaru berkoordinisasi dengan bagian umum untuk melakukan perbaikan oleh yang berpengalaman untuk memperbaiki gangguan jaringan yang error.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan oleh penulis, antara lain.

1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru agar dapat terus berperan aktif dalam menjalankan peraturan pemerintah dalam melaksanakan Pemotongan maupun Penyeteran pajak dan selalu mengetahui aturan yang baru dan tata cara yang berlaku, mengingat pajak merupakan sumber Negara penerimaan yang terbesar pemerintah khususnya pemerintah pusat.
2. Sebaiknya bendahara KPKNL Pekanbaru dalam penyeteran harus mengetahui tentang undang undang peraturan pemerintah yang terbaru serta melakukan sosialisasi mengenai perpajakan agar tidak terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kesalahan dalam penyetoran dan melakukan penyetoran tepat waktu agar tidak menyebabkan terlambatnya dalam penyetoran
3. Sebaiknya ditingkatkan lagi upaya dalam penyetoran agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam menyetor pajak penghasilan final atas lelang dan tidak terjadi lagi kendala-kendala dalam penyetoran agar penyetoran berjalan dengan lancar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunah.
- Drohar, dkk., Angreani A. (2017). “Analisis Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Terhadap Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado”. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado Manado
- Mardiasmo. 2016, *Perpajakan. edisi Revisi* . Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/ atau Bangunan beserta Perubahannya.
- Resmi, siti. 2017. *Perpajakan teori dan kasus* (edisi ke 10 buku 1). Jakarta salemba empat.
- _____, 2014. *Perpajakan teori dan kasus*, edisi ke 4 . Jakarta , salemba empat
- Rusjdi, Muhammad, 2017. PPh; Pajak penghasilan, edisi keempat, indeks, Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- Wahyuni, Nita dkk. 2018. Pajak penghasilan Indonesia, edisi pertama, pekanbaru
- <https://almanhaj.or.id/2437-Pajak-dalam-islam.html>(diakses pada senin,17 februari 2020 pukul 12.00 WIB)
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekanbaru>(diakses pada selasa,18 februari 2020 pukul 14.00 WIB)
- <http://sse.pajak.go.id> (diakses pada selasa ,18 februari 2020 pukul 16.00 WIB)
- <https://lelang.co.id> (diakses pada rabu,19 februari 2020 pukul 18.00 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Berapa target realisasi dan persentase Pokok lelang pada tahun 2017-2019 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru ?

Peraturan undang-undang tahun berapa yang dipakai untuk pemotongan dan penyetoran PPh final atas lelang tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru ?

Berapa tarif pajak dalam pemotongan PPh final atas lelang tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru ?

Apakah ada aturan khusus yang dikeluarkan KPKNL Pekanbaru?

Bagaimana prosedur lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?

6. Apakah ada target jumlah peserta lelang dalam pelaksanaan lelang ?

7. Apa saja kendala yang dihadapi pada saat proses lelang lelang baik secara manual dan secara online?

8. Bagaimana cara mengikuti lelang melalui online pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru ?

9. Apakah dampak apabila pemenang lelang terlambat meyetor pelunasan pokok lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru ?

10. Apakah perubahan terjadi setelah pelaksanaan lelang melalui online pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru ?

1. Bagaimana pelaksanaan penyetoran PPh final atas lelang tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru ?

2. Bagaimana cara menyetor Pajak dengan sistem e-billing dalam penyetoran PPh final atas lelang tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru?

3. Mengapa dalam penyetoran tidak mewajibkan memakai NPWP penjual lelang?

4. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala saat penyetoran PPh final atas lelang tanah dan bangunan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pekanbaru?



© Hak

Lelang, Yang
Lelang, Yang
Lelang, Yang

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	KEMENTERIAN
	PENERIMAAN PAJAK	KEUANGAN

Data Pembayaran:
 Tanggal Jam Bayar : 18/10/2018 16:55:51 NTB : 181018790174
 Tanggal Buku : 19/10/2018 NTPN : 55DCC82HU17C72T2
 Kode Cab. Bank : 0374 STAN : 908262

Data Setoran:
 Kode Billing : 118100694188912
 NPWP : 04.000.000.0-211 000
 Nama Wajib Pajak : ORANG PRIBADI NON NPWP
 Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 247,-
 Nomor Objek Pajak : -
 Akun : 411128
 Jenis Setoran : 402
 Masa Pajak : 10102018
 No Ketetapan : 000000000000000
 Jumlah Setoran : Rp. 18,165,000.00 Mata Uang : IDR
 Terbilang : DELAPAN BELAS JUTA SERATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH
 Uraian Pembayaran : BTN Pku SHM 1281 & 1165 RL 798/2018

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

04.000000.0.211.0000 ORANG PRIBADI NON NPWP 0000411128 4021010 18165000.00
 1018160940 19102018 18102018 55DCC82HU17C72T2 181018790174 908262009997

Bendahara Penerimaan KPKNL Pekanbaru


David Sihombing
NIP. 199204052014111005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail- fekonos@uin-suska.ac.id

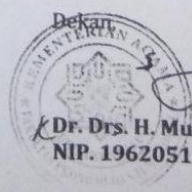
Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1039/2020 Pekanbaru, 12 Februari 2020 M
Sifat : Biasa 17 Jumadil Akhir 1441 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Kepada
Yth. **Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Lif Ruldayani
NIM : 01770623555
Jurusan : D-III Perpajakan
Semester : VI (Enam)

Adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul : **“Implementasi Pemotongan Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final (Pph Final) Atas Lelang Tanah dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru”**. Sehubungan dengan ini, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut ini. Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512/198903 1 003

TARGET DAN REALISASI HASIL LELANG KPKNL PEKANBARU

NO	TAHUN	FREKUENSI						POKOK LELANG						PNBP					
		TARGET	REALISASI	%	↑ ATAU ↓ SETIAP TAHUN		TARGET	REALISASI	%	↑ ATAU ↓ SETIAP TAHUN		TARGET	REALISASI	%	↑ ATAU ↓ SETIAP TAHUN				
					TARGET	REALISASI				TARGET	REALISASI				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
1	2015	690	1327	192%															
2	2016	725	1400	193%	5%	6%	45.000.000.000	97.943.894.222	218%	13%	18%	3.140.500.000	4.558.211.611	145%	68%	34%			
3	2017	900	1217	135%	24%	-13%	54.000.000.000	160.504.774.882	297%	20%	64%	3.768.600.000	7.480.016.831	198%	20%	64%			
4	2018	902	1191	132%	0,2%	-2%	135.407.000.000	71.477.341.100	53%	151%	-55%	5.467.864.000	4.503.532.051	82%	45%	-40%			
5	2019	Total	810	1374	170%	-10%	15%	172.000.000.000	134.209.165.290	78%	27%	88%	4.340.000.000	4.303.055.672	99%	-21%	-4%		
		PL I	810	1374	170%	-10%	15%	90.000.000.000	71.708.195.290	79,7%			2.700.000.000	3.053.036.272	113%				
		Pegadaian						82.000.000.000	62.500.970.000	76,2%			1.640.000.000	1.250.019.400	76%				
6	2020	Total		41				2.462.533.100					86.851.662						
		PL I		41				2.079.143.000					79.183.860						
		Pegadaian						383.390.100					7.667.802						

Diindungi Undang-
 g mengutip sebag
 jutipan hanya unt
 jutipan tidak meru
 g mengumumkkan
 cipta milik

ty of Sultar
 san kritik atau t
 UIN Suska Ria

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis dilahirkan di Jawi-Jawi pada tanggal 01 maret 1997 Merupakan putri dari Khairul Efendi dan Nurhidayah. Penulis mengawali pendidikan fomal pada SDN 032 Koto Perambahan pada tahun 2003, terus melanjutkan pendidikan tingkat pertama di Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih pada tahun 2009, pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikannya di Sman 1 Model Kampar Timur dan lulus pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan Pendidikan SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Pekanbaru dan di terima di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Tahun 2017.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru selama 2 bulan, yaitu pada bulan juli sampai dengan bulan Agustus pada tahun 2019. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL (PPH FINAL) ATAS LELANG TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKANBARU ”**